

**INDONESIA'S ECONOMIC DEPENDENCE ON CHINA AND
ITS EFFORTS TO DEFEND ITS SOVEREIGNTY DURING THE SECOND TERM
OF JOKO WIDODO: THE CASE OF THE NORTH NATUNA SEA**

**Trystanto
20/457823/SP/29540**

ABSTRACT

This thesis will examine how Indonesia defends its sovereignty and territorial integrity over its maritime territory in the North Natuna Sea while economically dependent on China. China argued that it had an 'undisputable sovereignty' inside its nine-dash line covering most of the South China Sea. The Chinese claim overlaps with Indonesia's legal Exclusive Economic Zone northeast of the Natuna Island. In recent years, China has shown a growing propensity to use China's economic relations with other countries as a political-economic weapon to compel other countries to adhere to Chinese demands. In light of this phenomenon, this undergraduate thesis attempts to use the framework of neomercantilism to discuss and analyze why Indonesia defends and upholds its sovereignty over the North Natuna Sea while being heavily dependent economically on China. This undergraduate thesis finds that, following the neo-mercantilist framework, the Indonesian government believes that the interests of upholding sovereignty must not be subordinated to the interest of continuing to receive Chinese economic benefits. This is proven by public and legal statements by Indonesian government officials that refused to acknowledge the legitimacy of the nine-dash line. Additionally, when tensions escalate and garner national attention, the government would conduct military exercises in the region to further solidify its position.

Keywords: China; Indonesia; Natuna; Economic dependence; Sovereignty.

ABSTRAK

Skripsi ini akan mengkaji bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatan dan keutuhan teritorial atas wilayah maritimnya di Laut Natuna Utara meskipun bergantung secara ekonomi pada Cina. Cina mengklaim bahwa mereka memiliki 'kedaulatan yang tidak dapat disangkal' (undisputable sovereignty) dalam sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim Cina tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sah di timur laut Pulau Natuna. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan hubungan ekonominya dengan negara lain sebagai senjata politik-ekonomi untuk memaksa negara tersebut memenuhi tuntutan Cina. Melihat fenomena tersebut, skripsi ini mencoba menggunakan kerangka neomerkantilisme untuk menganalisis mengapa Indonesia mempertahankan dan menjunjung kedaulatannya atas Laut Natuna Utara meskipun Indonesia sangat bergantung secara ekonomi pada Cina. Skripsi ini menemukan bahwa, sesuai dengan kerangka neo-merkantilisme, pemerintah Indonesia menganut kepercayaan bahwa kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan untuk terus menerima manfaat kerjasama ekonomi dengan Cina. Ini dibuktikan dengan pernyataan publik dan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintah Indonesia yang menolak untuk mengakui keabsahan nine-dash line. Di samping itu, apabila ketegangan memuncak dan menarik perhatian publik, pemerintah akan melaksanakan latihan militer di Laut Natuna Utara untuk memperkuat posisinya.

Kata-kata kunci: Cina; Indonesia; Natuna; Ketergantungan ekonomi; Kedaulatan.